

MU'ADALAH

Jurnal Studi Gender dan Anak
Volume IV, Nomor 2, Juli-Desember 2017

Pemimpin Redaksi

Irfan Noor

Sekretaris Redaksi

Mariatul Asiah

Tim Penyunting

Zainal Fikri

Nuril Huda

Ahdi Makmur

Dina Hermina

Sahriansyah

Gusti Muzainah

Fatrawati Kumari

Tata Usaha

Radiansyah

M. Ramadhan

Sari Datun Rahima

Maman Faturrahman

Alamat Redaksi

Pusat Studi Gender dan Anak
Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LP2M)
UIN Antasari Banjarmasin
Telp. 0511-3256980 - Email:
jurnalmuadalah@gmail.com

Daftar Isi

Halaman Muka, i

Daftar Isi, ii

Gender Mainstreaming:

Peluang dan Tantangan Akademik, 93-100

Chici Rima Putri Pratama

Sensitivitas *Gender* dalam Organisasi

Kemahasiswaan di IAIN Antasari

Banjarmasin 101-112

Wardah Hayati, Yokke Andini, Saridatun Rahimah

Efektivitas Kelas Edukasi (KE) Menyusui
untuk Meningkatkan Efikasi Diri 113-122

Dina Aprilia & Aziza Fitriah

Pendidikan Karakter Perilaku Sosial Anak
Usia Sekolah Dasar 123-138

Taufiqurrahman

Coping Stress Istri dalam Perkawinan
Poligini di Kota Banjarmasin 139-160

Hj. Siti Faridah

Mu'adalah merupakan Jurnal Studi Gender dan Anak yang menjadi media kajian dan penelitian di bidang gender dan anak. Diterbitkan secara berkala dua kali dalam setahun (Januari dan Juli) oleh Pusat Studi Gender dan Anak - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Antasari Banjarmasin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

Mad dan Diftong :

1.	Fathah panjang	:	Â / â	4.	أو	:	Aw
2.	Kasrah panjang	:	Î / î	5.	أي	:	Ay
3.	Dhammah panjang	:	Û / û				

Gender Mainstreaming: Peluang dan Tantangan di Dunia Akademik

Chici Rima Putri Pratama

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ABSTRAK

Dunia Akademik merupakan pembawa semangat dan sikap tidak diskriminatif dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dengan melibatkan semua *stakeholder* pendidikan serta berlandaskan *trust* (kepercayaan), sehingga tumbuh dan berkembang dalam atmosfer yang kondusif dan harmonis didalam proses kesetaraan gender. Didalam kegiatan itulah dibutuhkan konsep gender yang mengacu pada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri perempuan dan laki-laki sebagai akibat benturan budaya atau lingkungan masyarakat. Sehingga muncul dikotomi feminin (perempuan) dan maskulin (laki-laki). Di masyarakat perempuan digambarkan dengan sifat-sifat femininnya, seperti : lemah, pemalu, penakut, emosional, lemah gemulai. Sebaliknya laki-laki selalu digambarkan dengan sifat-sifat maskulinnya, seperti : gagah, perkasa, tegar, berani, dan rasional. Feminitas dan maskulinitas ini sesungguhnya merupakan hasil konstruksi sosial, bukan hal yang kodrati. *Kata kunci : Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming), Dunia Akademik, Pendidikan dan Kesetaraan*

PENDAHULUAN

Didalam sebuah dinamika pembangunan dan keberhasilan dalam menjalani proses historis kehidupan memiliki tingkatan akan sangat tergantung pada peran serta laki-laki dan perempuan secara bersamaan sebagai pelaku dan pemanfaatnya. Ketidakseimbangan serta peminggiran terhadap peran serta dari salah satu elemen tersebut bisa berakibat pada ketimpangan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, semua program pemberdayaan harus memperhatikan dan diorientasikan pada pencapaian dan optimalisasi peran yang setara antara laki-laki dan perempuan. Tidak terlepas juga dari peran pemerintah dan peran akademik. Hal ini dibuktikan dari Keikutsertaan Indonesia sebagai salah satu peserta Kongres Wanita Sedunia Ke-4 di Beijing Tahun 1995, secara eksplisit Indonesia menerima mandat untuk mengimplementasikan gender ke dalam pembangunan. Artinya menjadikan kepentingan dan pengalaman perempuan dan laki-laki menjadi dimensi integral dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian kebijakan-kebijakan dalam program pembangunan.

Sebagai relasi dari program pembangunan, Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1999 melalui Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menyatakan bahwa *mainstreaming* (pengarusutamaan) gender dibaca *jender* merupakan kebijakan nasional. Berdasarkan INPRES Nomor 9 Tahun 2000, Departemen Pendidikan dan Nasional (Depdiknas) Republik Indonesia melaksanakan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan dan mengupayakan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan pembangunan pendidikan yang berperspektif gender. Dalam rangka akselerasi tujuan pembangunan akademik serta kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka didunia akademik perlu berperspektif gender yang disosialisasikan di tingkat pusat dan daerah baik kepada tingkat penentu kebijakan, tingkat pelaksana operasional, dan para *stakeholder* akademik.

Fakta dilapangan sampai saat ini masih menunjukkan bahwa kedudukan dan peran perempuan Indonesia walaupun sudah diupayakan dengan berbagai strategi dan pendekatan belum menunjukkan hasil yang memadai karena pendekatan pembangunan yang dikembangkan belum mempertimbangkan manfaat yang merata dan adil bagi laki-laki dan perempuan sehingga mengakibatkan terciptanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang lebih dikenal dengan kesenjangan gender (*gender gap*) yang akan mengakibatkan pula pada berbagai permasalahan gender. Indikator yang dipakai untuk melihat dan mengukur kesenjangan tersebut digunakan *Gender Empowerment Measurement* (GEM) dan *Gender Related Development Index* (GDI) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Human Development Index (HDI). Fakta ketidakadilan gender dalam diperkuat dengan adanya Human Development report tahun 2002 yang menunjukkan GDI masyarakat Indonesia Indonesia masih menempati urutan 91 dari 173 negara dan HDI Indonesia yang berada pada peringkat 110 dari 173 negara. Oleh karena itulah berbagai strategi yang dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan terus dikembangkan seperti strategi terakhir yaitu strategi pengarusutamaan gender (*Gender Mainstreaming*). Yang menjadi pertanyaan, apakah peran akademik mampu menjadi penggerak pengarusutamaan gender? tantangan-tantangan apa saja yang ada bagi akademisi dalam menghadapi kesenjangan gender?

Permasalahan Gender di Dunia Akademik

Pemerintah Indonesia telah memasukkan berbagai upaya untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945, Pasal 31 yang berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran". Perluasan kesempatan belajar di Sekolah Dasar (SD) mulai dilakukan secara intensif

sejak tahun 1973, melalui pemerataan berbagai fasilitas pendidikan. Kemudian Program Wajib Belajar 6 (enam) tahun pada tahun 1984 dan Program Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun pada tahun 1994. Hasilnya pada tahun 1999/2000 Angka Partisipasi Murni (APM) SD mencapai 94,96%, dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 72,60%. Perluasan kesempatan belajar di SD dan SLTP ini mempengaruhi peningkatan APK pada jenjang pendidikan menengah hingga 37,60% dan pendidikan tinggi hingga 10,00%¹.

Meskipun kebijakan pendidikan di Indonesia tidak membedakan akses menurut jenis kelamin, dalam kenyataannya perempuan masih tertinggal dalam menikmati kesempatan belajar. Berdasarkan data statistik dari Badan Pusat Statistik menunjukkan penduduk perempuan yang berhasil menyelesaikan pendidikan SLTP ke atas baru mencapai 36,90%, sementara penduduk laki-laki 46,00%. Kemudian penduduk perempuan yang berpendidikan tinggi baru sekitar 03,06% atau lebih rendah dari penduduk laki-laki yang mencapai 04,17%. Selain itu persentase penduduk perempuan yang buta huruf sebesar 23,10%, lebih tinggi dari penduduk laki-laki yang mencapai angka 10,70%².

Perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh pendidikan masih dapat dipahami dan dianggap wajar, jika perbedaan tersebut masih terbatas karena perbedaan jenis kelamin. Yang menjadi permasalahan adalah terjadinya perbedaan karena adanya efek diskriminasi gender (*gender discrimination effects*), yaitu perbedaan kesempatan atau perilaku antara perempuan dan laki-laki dalam sistem pendidikan, dan perbedaan itu menyebabkan terjadinya kesenjangan

¹ Bappenas. 2001. *Analisis Gender dalam Pembangunan Pendidikan*.

² Depdiknas. 2003. *Pedoman Umum Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan*. Jakarta: Dikdasmen Depdiknas

antara perempuan dan laki-laki. Efek diskriminasi gender tersebut mungkin saja tidak sengaja diciptakan atau disebabkan oleh tindakan seseorang atau kelompok orang, tetapi terkonstruksi oleh nilai-nilai sosial-budaya patriarki yang cenderung masih dianut oleh masyarakat yang dalam banyak hal masih terlegitimasi dalam kebijakan, program, peraturan, mekanisme, dan prosedur baku.

Permasalahan Gender lain di dunia akademik lainnya dapat dilihat dan dirasakan pada ranah Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) yang tidak setara dan tidak adil. Tingginya angka disparitas akses dan partisipasi peserta didik antara laki-laki dan perempuan dalam proses pendidikan dan pengembangan diri merupakan fakta penyelenggaraan pendidikan yang netral gender atau bahkan tidak kenal atau buta terhadap gender. Positioning peran pengambil keputusan (kontrol) juga masih diwarnai dengan rendahnya pengakuan akan kapasitas dan kualitas kepemimpinan perempuan. Peran domestik perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pengasuhan anak, seringkali menjadi alasan penghalang partisipasi perempuan dalam jajaran pengambil keputusan. Masalah gender lain lagi adalah ranah kurikulum, proses pembelajaran, hubungan dan pergaulan sivitas akademika, juga sarana fasilitas pembelajaran seringkali mencerminkan kesenjangan dan bias gender yang sangat kuat. Penyediaan fasilitas umum dan tata ruang bangunan gedung seperti tangga, toilet, ruang ibadah, ruang khusus laktasi, tempat penitipan anak, seyogyanya memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan khusus tidak hanya bagi perempuan, tapi juga bagi penyandang disabilitas dan orang tua.

Permasalahan kesenjangan gender dalam pendidikan yang paling menonjol menurut Widodo dalam penelitiannya diantaranya:

1. Semakin tinggi jenjang pendidikan makin lebar kesenjangan gendernya;
2. Kurangnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan dan terbatasnya pemahaman para pengelola dan pelaksana pendidikan akan pentingnya kesetaraan gender;
3. Masih terjadi gejala segregasi gender (gender segregation) dalam pemilihan jurusan atau program studi di Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan;
4. Di daerah pedesaan anak perempuan didorong untuk menikah dan meninggalkan sekolah. Kesetaraan gender dalam bidang pendidikan menjadi sangat penting mengingat sektor pendidikan merupakan sektor yang sangat strategis untuk memperjuangkan kesetaraan gender³.

Beda halnya dari Hasil penelitian Logsdon serta Astuti, Indarti, dan Satriyani dalam bukunya Dewiki dan Mutiara juga menunjukkan bahwa buku-buku teks yang digunakan di SD, baik untuk pelajaran Bahasa Indonesia maupun pelajaran yang lain ternyata memuat bias gender, yaitu memuat pemilahan antara laki-laki dan perempuan. Ayah digambarkan bekerja di sektor publik seperti kantor, kebun dan sejenisnya, sedangkan ibu digambarkan di sektor domestik, seperti dapur, memasak, mencuci, mengasuh adik, dan sejenisnya⁴.

Berdasarkan hal di atas, maka kemauan dan komitmen yang tinggi adalah keniscayaan untuk dapat membangun paradigma yang responsif sekaligus sensitif gender, di lingkungan akademik termasuklah di Perguruan Tinggi.

³ Wahyu Widodo, Analisis Situasi Pendidikan Berwawasan Gender di Propinsi Jawa Timur. *Jurnal Humanity* dalam ejournal.umm.ac.id

⁴ Dewiki, Santi dan Dewi Mutiara. Perspektif Gender dalam Bahan Ajar Cetak Pada Pendidikan Jarak Jauh: Studi Kasus: Bahan Ajar Cetak Program Studi D2 Pendidikan Olahraga FKIP-UT. Dalam *Jurnal Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2008, 41-50.

Membangun Budaya Responsif Gender di dunia Akademik

Dunia pendidikan merupakan salah satu media vital untuk membangun budaya responsif gender terutama di Perguruan Tinggi. Hal ini karena eksistensi Perguruan tinggi memainkan peran signifikan dalam membangun budaya dan kebudayaan. Ada beberapa landasan pemikiran mengapa Perguruan tinggi harus dijadikan wahana utama dalam membangun budaya responsif gender ini. Pertama, Perguruan Tinggi adalah belantara pengetahuan yang mempunyai tugas pokok mengkaji dan mentransformasikan pengetahuan serta mendesiminasikan ide-ide dan nilai baru pada masyarakat. Reproduksi pengetahuan, ideologi, dan doktrin dilakukan melalui kebijakan ataupun atmosfer akademik dan atmosfer kerja. Kedua, Pendidikan Tinggi merupakan wadah institusional tempat semua civitas akademika (laki-laki dan perempuan) mengekspresikan segala potensi, mengaktualisasikan dan mendefinisikan identitas dirinya. Ketiga, strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan adalah paket kebijakan yang niscaya untuk diimplementasikan oleh institusi negara, termasuk Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi juga Kementerian Agama.

Pedoman Umum Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan (Depdiknas, 2003) menyajikan secara lengkap dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, semua pihak harus memahami dan mengacu kepada beberapa hal di bawah ini :

1) Konsep Pembangunan Gender

Konsep pembangunan gender tidak dapat dilepaskan dari konsep pembangunan kualitas SDM secara keseluruhan karena pembangunan gender berorientasi pada:

- a. Produktivitas, perempuan memiliki potensi dan kemampuan untuk meningkatkan produktivitasnya

dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan kerja.

- b. Pemerataan, setiap perempuan harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan untuk akses dan partisipasi mereka dalam berbagai bidang kehidupan harus dihapuskan sehingga memperoleh peluang yang sama dengan laki-laki.
- c. Pemberdayaan, semua perempuan seyogyanya berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi kehidupan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang utuh terhadap pembangunan.
- d. Berkelanjutan, akses perempuan terhadap setiap peluang dan kesempatan bukan hanya untuk generasi sekarang tapi juga untuk generasi yang akan datang. Segala bentuk sumber daya fisik, manusia, alam perlu selalu diperbaharui dan dikembangkan secara terus-menerus.

2) Pendekatan Pembangunan Gender

Kebijakan pembangunan sektoral dan daerah yang perspektif gender diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Para perumus kebijakan, pengambilan keputusan, perencana, dan pelaksana di berbagai sektor pembangunan perlu ditingkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuannya tentang pembangunan yang berperspektif gender.

Pendekatan pembangunan gender harus diintegrasikan dalam mekanisme perencanaan dan program yang telah ada dengan berorientasi pada Pembangunan Gender (*Gender Development*) bukan pada perempuan dalam pembangunan (*Women in Development*). Pembangunan gender dalam berbagai bidang kehidupan

mendasarkan pada dua konsep yang berkaitan, yaitu konsep seks dan konsep kesetaraan gender. Konsep seks berkaitan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki yang secara kodrati tidak dapat disamakan. Sementara konsep kesetaraan gender berkaitan dengan peran dan fungsi pembangunan ekonomi, politik, dan sosial-budaya yang tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain kesetaraan gender adalah kesamaan antara perempuan dan laki-laki dalam melaksanakan peran dan fungsi pembangunan dengan tetap memperhitungkan keterbatasan jenis kelamin.

3) Tujuan dan Strategi Penyetaraan Gender

Dalam pengarusutamaan gender bidang pendidikan dalam rumusan kebijakan pembangunan pendidikan nasional bertujuan:

- a. Mewujudkan kesempatan pendidikan yang lebih merata pada semua jalur, jenis, dan jenjang dengan memperhatikan kesetaraan gender.
- b. Memacu peningkatan mutu dan efisiensi pendidikan melalui pemberdayaan potensi perempuan secara optimal.
- c. Memperkecil ketimpangan gender pada jurusan, bidang kejuruan, atau program studi yang ada pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang keahlian dan profesionalisme.

Adapun strategi kebijakan penyetaraan gender dalam pencapaian tujuan tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan peluang bagi perempuan untuk memasuki semua jenis dan jenjang pendidikan, dengan memberikan kemudahan bagi perempuan khususnya dalam memilih program studi atau jurusan yang bias laki-laki.

- b. Meningkatkan kemampuan para pengembang kurikulum dan para penulis perempuan untuk bahan ajar secara profesional dan proporsional laki-laki.
- c. Meningkatkan keseimbangan jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menurut gender dan partisipasi perempuan dalam kedudukannya sebagai pengambil keputusan di bidang pengelolaan pendidikan nasional.

Dalam mekanismenya pendidikan demokratis dan berwawasan gender (sebagai implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender) yaitu membawa semangat demokrasi dan sikap tidak diskriminatif dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks ini James A. Beane dan Michael W. Apple⁵ menjelaskan berbagai kondisi yang perlu dikembangkan dalam upaya membangun penyelenggaraan pendidikan yang demokratis dan tidak diskriminatif, antara lain:

1. Keterbukaan saluran ide dan gagasan, sehingga semua orang dapat menerima informasi seoptimal mungkin.
2. Memberikan kepercayaan kepada individu-individu dan kelompok dengan kapasitas yang mereka miliki untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan.
3. Memperlihatkan keperdulian terhadap kebutuhan dan permasalahan publik.
4. Ada keperdulian terhadap harga diri, hak-hak individu, dan hak-hak minoritas (perbedaan gender).
5. Ada tindak lanjut yang konkrit dan berkesinambungan dalam memelihara dan mempromosikan sikap-sikap demokratis dan tidak diskriminatif.

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa pendidikan demokratis

⁵ Rosyada, Dede, Paradigma Pendidikan Demokratis, Prenada Media, Jakarta, 2004

dan berwawasan gender akan terwujud jika semua informasi penting (program-program) dapat dijangkau semua *stakeholder* pendidikan, sehingga semua unsur tersebut memahami arah pengembangan pendidikan, berbagai problem yang dihadapinya, dan langkah-langkah yang sedang dan akan ditempuh. Dengan demikian semua pihak yang terkait akan dapat menganalisis relevansi kebijakan tersebut, memahami, mengkritisi, dan memberi masukan, menentukan kontribusi, dan partisipasi untuk kesuksesan program-program bidang pendidikan tersebut. Selain itu, harus dikembangkan sikap *trust* (kepercayaan) antar pihak di dalamnya guna mendukung penyelenggaraan pendidikan dalam atmosfir yang kondusif dan harmonis.

Gender Mainstreaming : Langkah Awal

Gender Mainstreaming atau Pengarusutamaan adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui perencanaan dan penerapan kebijakan yang berperspektif gender pada organisasi dan institusi. Pengarusutamaan gender merupakan strategi alternatif bagi usaha percepatan tercapainya kesetaraan gender karena nuansa kepekaan gender menjadi salah satu landasan dalam penyusunan dan perumusan strategi, struktur, dan sistem dari suatu organisasi atau institusi, serta menjadi bagian dari nafas budaya di dalamnya. Strategi ini merupakan strategi integrasi kesamaan gender secara sistemik ke dalam seluruh sistem dan struktur, termasuk kebijakan, program, proses dan proyek, budaya, organisasi atau sebuah agenda pandangan dan tindakan yang memprioritaskan kesamaan gender berdasarkan Inpres No 9 Tahun 2000 yaitu Presiden menginstruksikan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender sesuai dengan bidang tugas

dan fungsi serta kewenangan masing-masing⁶.

Pengarusutamaan gender dalam pendidikan bukanlah sebuah program yang semata-mata ditambahkan secara khusus (add-on). Salah satu strategi pokok dan langkah pertama dalam membangun kesetaraan gender di lingkungan perguruan tinggi adalah menjadikan perspektif gender sebagai arus utama. Strategi ini harus dilakukan pada semua lini dan tahapan penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perencanaan, penganggaran, implementasi, evaluasi dan monitoring program. Menjadikan perspektif gender sebagai arus utama dengan memperhatikan dan mempertimbangkan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki juga perempuan⁷.

Political Will sebagai Prasyarat Mainstreaming Gender

Ciri utama dari PPRG adalah perencanaan dan penganggaran yang mempertimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan, serta memberikan kebermanfaatan bagi keduanya pula. Harus dipahami bahwa gender tidak selalu identik dengan perempuan. Pada titik inilah *political will* dari pimpinan sebagai kuasa pengambil keputusan menjadi niscaya untuk mengantarkan suksesnya program penguatan PPRG di Dunia Pendidikan terutamadi Perguruan Tinggi. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah dominasi perempuan pada level pemegang kontrol menjadikan responsifitas dan sensitifitas gender otomatis melekat pada kebijakan dan program yang dilaksanakan. Tentu pertanyaan ini akan terjawab melalui aksi nyata dari penyelenggaraan program. Keinginan kuat dari pengampu kebijakan menjadi tak bermakna tanpa didukung infrastruktur, focal point dan

⁶ Kementrian Negara pemberdayaan Perempuan, *Modul Fasilitasi Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bagi Fasilitator kategori Pengembangan*, Jakarta: Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2006

⁷ Kementrian Negara pemberdayaan Perempuan, *Mainstreaming Gender*, Jakarta: Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2010

partisipasi semua pihak, serta budaya akademik dan budaya kerja di Dunia Akademik.

Adanya political will ini akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang konstruktif dalam membangun budaya responsif gender. Bila prasyarat ini sudah terpenuhi, maka pilot project ini akan berjalan secara terkonsep, sistematis dan kontinyu.

Kesimpulan

Dalam proses sebuah pembangunan dan keberhasilan dalam menjalani proses historis kehidupan memiliki tingkatan akan sangat tergantung pada peran serta laki-laki dan perempuan secara bersamaan sebagai pelaku dan pemanfaatnya. Tidak terkecuali dalam pembangunan di bidang Akademik terutama di Perguruan Tinggi. Salahsatu permasalahan yang sering muncul adalah terjadinya perbedaan karena adanya efek diskriminasi gender (*gender discrimination effects*), yaitu perbedaan kesempatan atau perilaku antara perempuan dan laki-laki dalam sistem pendidikan, dan perbedaan itu menyebabkan terjadinya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Efek diskriminasi gender tersebut mungkin saja tidak sengaja diciptakan atau disebabkan oleh tindakan seseorang atau kelompok orang, tetapi terkonstruksi oleh nilai-nilai sosial-budaya patriarki yang cenderung masih dianut oleh masyarakat yang dalam banyak hal masih terlegitimasi dalam kebijakan, program, peraturan, mekanisme, dan prosedur baku. Oleh karena itulah berbagai strategi yang dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan terus dikembangkan seperti strategi terakhir yaitu strategi pengarusutamaan gender (*Gender Mainstreaming*). Adapun beberapa strategi kebijakan penyetaraan gender dalam pencapaian tujuan tersebut diantaranya meningkatkan peluang bagi perempuan untuk memasuki semua jenis dan jenjang pendidikan, dengan memberikan kemudahan bagi perempuan khususnya dalam memilih

program studi atau jurusan yang bias laki-laki, meningkatkan kemampuan para pengembang kurikulum dan para penulis perempuan untuk bahan ajar secara profesional dan proporsional laki-laki dan meningkatkan keseimbangan jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menurut gender dan partisipasi perempuan dalam kedudukannya sebagai pengambil keputusan di bidang pengelolaan pendidikan nasional. Dengan menjadikan perspektif gender sebagai arus utama dengan memperhatikan dan mempertimbangkan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki juga perempuan menjadikan keseimbangan gender dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. 2001. *Analisis Gender dalam Pembangunan Pendidikan*.
- Depdiknas. 2003. *Pedoman Umum Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan*. Jakarta: Dikdasmen Depdiknas
- Wahyu Widodo. Analisis Situasi Pendidikan Berwawasan Gender di Propinsi Jawa Timur. *Jurnal Humanity dalam ejournal.umm.ac.id*
- Dewiki, Santi dan Dewi Mutiara. Perspektif Gender dalam Bahan Ajar Cetak Pada Pendidikan Jarak Jauh: Studi Kasus: Bahan Ajar Cetak Program Studi D2 Pendidikan Olahraga FKIP-UT. dalam *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2008, 41-50.
- Rosyada, Dede. 2006. *Paradigma Pendidikan Demokratis*, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Kementrian Negara pemberdayaan Perempuan, *Modul Fasilitasi Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bagi Fasilitator kategori Pengembangan*, Jakarta: Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan

Kementerian Negara pemberdayaan
Perempuan, *Mainstreaming
Gender*, Jakarta: Kementerian
Negara Pemberdayaan Perempuan,
2010